

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
TINJAUAN FIQHI SIYASAH (STUDI KASUS DESA BANTILANG
KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah (IAIN) Palopo*

oleh :

**ARWANSYAH
NIM. 14.16.16.0007**

Dibawah Bimbingan:

Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.HI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2019

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
TINJAUAN FIQHI SIYASAH (STUDI KASUS DESA BANTILANG
KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur” yang ditulis oleh Arwansyah, NIM 14 1616 0007, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 24 Desember 2019 M, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar S.H.

TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Anita Marwing, S.HI, M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Nirwana Halide, S.HI, M.H | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nirwana Halide, S.HI, M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,



Rektor IAIN Palopo

Dr. Abdul Pirol, M.Ag
NIP.19691104 199403 1 004



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arwansyah
Nim : 14. 16. 16. 0007
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiat, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segalah kekeliruan yang ada didalamnya adala tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai mana mestinya, bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan saya.



Palopo, 2019
Yang membuat pernyataan

Arwansyah

NIM. 14.16.16.0007

2021/12/29 14:32

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqhi Siyash (Studi Kasus Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)**”. yang ditulis oleh:

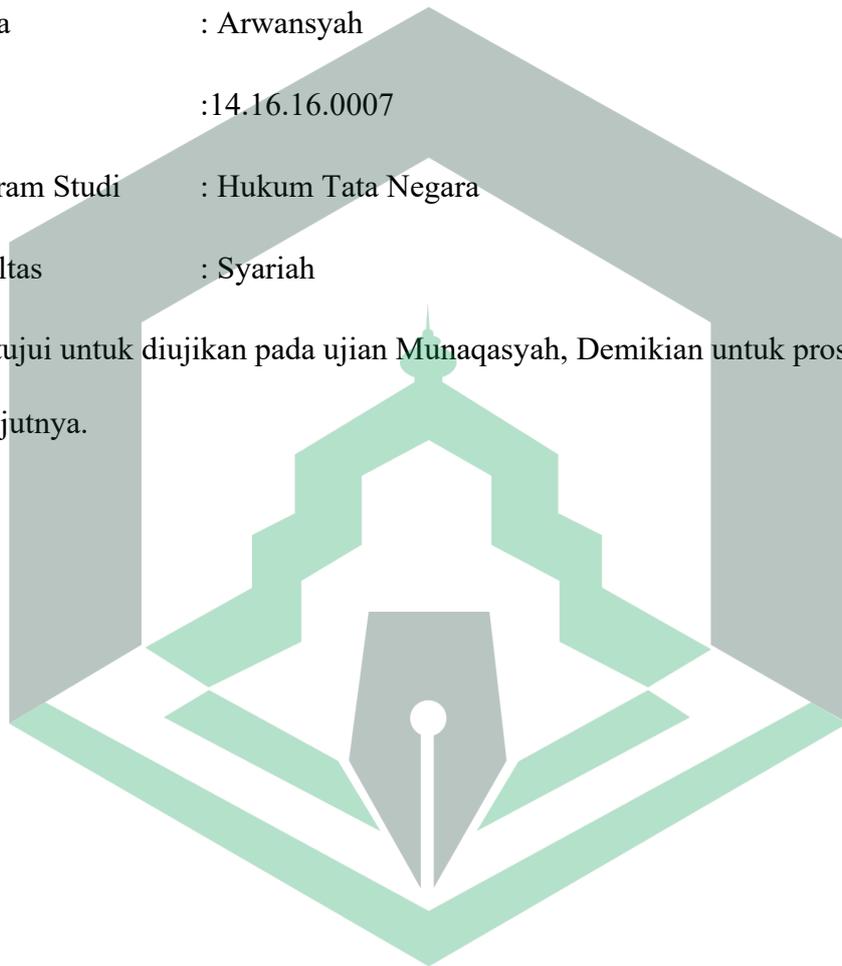
Nama : Arwansyah

Nim :14.16.16.0007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah, Demikian untuk proses selanjutnya.



Palopo,

2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Nirwana Halide, S.HI., M.HI.
NIP 19880106 201903 2 007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo,

2019

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Syariah IAIN Palopo
di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Arwansyah |
| Nim | : 14. 16. 16. 0007 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara |
| Fakultas | : Syariah |
| Judul | : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur) |

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo,

2019

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Syariah IAIN Palopo
di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Arwansyah

Nim : 14. 16. 16. 0007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Tinjauan Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Bantilang
Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing II

Nirwana Halide, S.HI., M.HI.
NIP 19880106 201903 2 007

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqhi Siyash (Studi Kasus Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)**”. yang ditulis oleh:

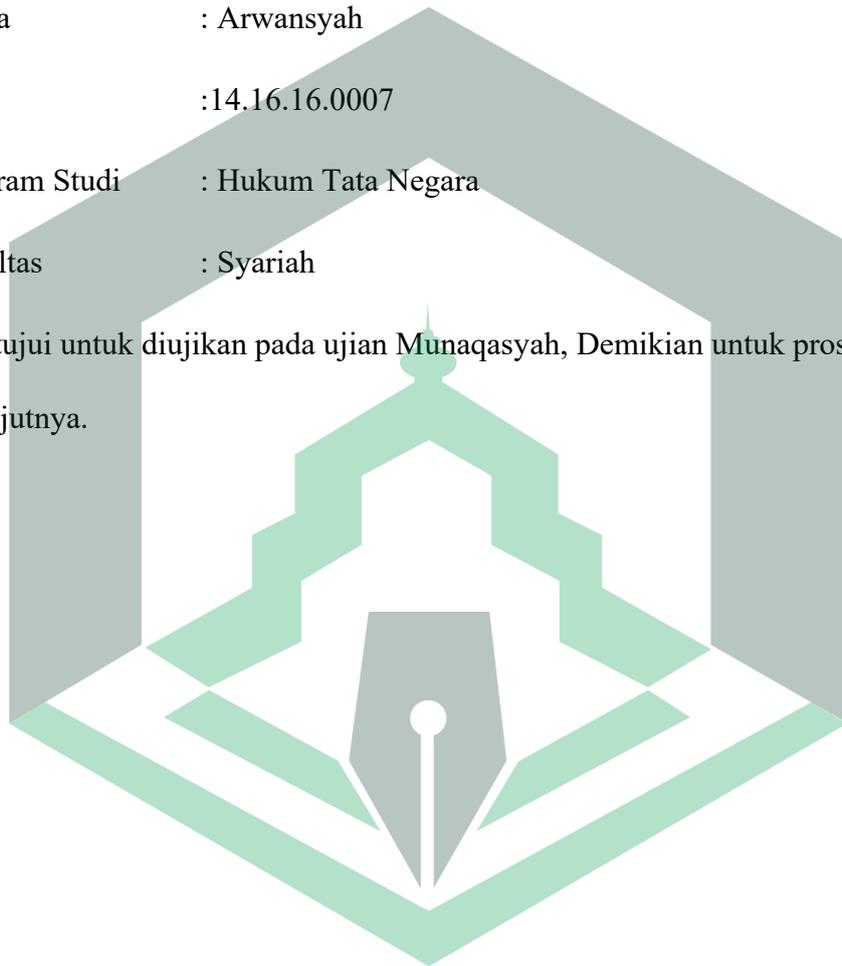
Nama : Arwansyah

Nim :14.16.16.0007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah, Demikian untuk proses selanjutnya.



Palopo,

2019

Penguji I

Penguji II

Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
NIP 19581231 199102 002

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi

Palopo,

2019

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Syariah IAIN Palopo
di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Arwansyah
Nim : 14. 16. 16. 0007
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Tinjauan Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Bantilang
Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penguji I

Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi

Palopo,

2019

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Syariah IAIN Palopo
di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Arwansyah
Nim : 14. 16. 16. 0007
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Tinjauan Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Bantilang
Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penguji II

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
NIP 19581231 199102 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | |
| PERSETUJUAN PENGUJI..... | |
| NOTA DINAS PENGUJI..... | |
| PRAKATA..... | |
| DAFTAR ISI..... | |
| ABSTRAK..... | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 5 |
| C. Tujuan penelitian | 5 |
| D. Manfaat penelitian..... | 6 |
| E. Definisi operasional dan penelitian..... | 7 |
| BAB II Tinjauan pustaka..... | 8 |
| A. Penelitian terdahulu yang relevan..... | 8 |
| B. Kajian pustaka..... | 10 |
| 1. Partisipasi..... | 10 |
| 2. Partisipasi masyarakat..... | 12 |
| 3. Prinsip-prinsip partisipasi | 16 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Bentuk dan tipe partisipasi..... | 18 |
| 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi | 22 |
| 6. Pembangunan..... | 25 |
| 7. Pembangunan dalam fiqh siyasah..... | 28 |
| 8. Kerangka fikir | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 34 |
| A. Pendekatan dan jenis penelitian | 34 |
| B. Lokasi penelitian..... | 34 |
| C. Sumber data | 34 |
| D. Subyek penelitian | 36 |
| E. Teknik pengumpulan data..... | 36 |
| F. Teknik analisi data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Hasil penelitian | 41 |
| 1. Sejarah Desa Bantilang | 41 |
| 2. Kondisi wilayah dan penduduk..... | 43 |
| 3. Keadaan sosial | 44 |
| 4. Kelembagaan Pemerintah Desa | 46 |
| 5. Struktur organisasi pemerintahan Desa Bantilang..... | 47 |
| 6. Visi dan Misi Desa Bantilang | 48 |
| 7. Peta Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur | 49 |
| B. Pembahasan..... | 50 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |

DOKUMENTASI

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Arwansyah 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)". Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Pembimbing (I) Dr. Anita Marwing. S.HI., M.HI. Pembimbing (II) Nirwana Halide, S.HI., M.HI.

Skripsi ini membahas tentang "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)" adapun yang menjadi tujuan Penelitian ini adalah : Mengetahui dan memahami partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, kemudian untuk mengetahui tinjauan fiqhi siyasah tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian hasilnya di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur berada dalam kategori sedang. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang yaitu *Faktor internal* seperti kesadaran (kemauan), penghasilan /pendapatan, tingkat pendidikan. *Faktor eksternal* seperti kepemimpinan pemerintah (Kepala Desa Bantilang beserta aparatnya). Tinjauan fiqhi siyasah dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur sudah sesuai dengan fiqhi siyasah, kerana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah dan Masyarakat melakukan pembangunan dengan tujuan kesejahteraan ummah.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya upaya-upaya oleh pemerintah merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Seperti memberikan kebebasan (kesempatan) kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan. Disamping itu pemerintah desa harus mampu menjalankan kepemimpinan sesuai karakter masyarakatnya, dengan demikian akan terjalin adanya komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan desa, pemerintah Desa Bantilang beserta jajarannya agar senantiasa memperbaiki dan mengejar pendidikan serta meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu menuju masyarakat yang makmur, sejahtera secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparat pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan.¹ Sedangkan menurut Bintarto, partisipasi dapat terjadi pada empat jenjang², yaitu :

1. partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
2. partisipasi dalam pelaksanaan
3. partisipasi dalam pemanfaatan hasil
4. partisipasi dalam evaluasi.

¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 650.

² Bintarto. *Pengantar Geografi Pembangunan*. (Yogyakarta: PT. Kedaulatan Rakyat, 1975), h. 4.

Sedangkan pembangunan adalah semua kegiatan masyarakat di suatu wilayah atau desa yang bersifat fisik maupun sosial. Dengan demikian yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dalam artikel ini adalah keikutsertaan anggota warga masyarakat di suatu wilayah atau daerah/desa dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan perencanaan program, pengambilan keputusan program, pelaksanaan program, dan pembiayaan yang dilakukan desa, baik itu kegiatan di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Agama Islam, Al-qur'an telah menganjurkan kita dalam bermasyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau saling tolong menolong, Karena pada dasarnya setiap individu adalah makhluk sosial.

Allah SWT berfirman :



Terjemahannya :

*"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."*³

Ayat ini sangat jelas kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong/kerjasama, karena apabila diantara manusia dalam sebuah masyarakat memiliki semangat kerjasama yang besar, maka hal itu akan menjadi modal besar dalam kemajuan materi dan spritual masyarakat karena kerjasama dan saling

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Anggota IKAPI JATIM: Publishing)

tolong menolong adalah sarana yang tepat untuk kemajuan dan perkembangan semua sisi di masyarakat.

Bahkan di dalam Islam tidak mengakui seorang menjadi muslim jika seseorang tersebut tidak ikut serta dalam mengupayakan kemajuan pekerjaan kaum muslim, Imam Shadiq a.s bersabda :

“siapa yang tidak mengupayakan kemajuan pekerjaan kaum muslimin, maka ia bukanlah seorang muslim”⁴

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa.

Bantilang adalah desa yang terletak di Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

⁴Kulaini, Muhammad bin ya'qub, periset dan editor: Ghafari, Ali Akbar, Ahundi, Muhammad, jil. 2, hal. 164, Tehran, Dar al-Islami, cet. 4, 1407 H.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh pemerintah Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur berupa penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam program pelaksanaan pembangunan. Pemberian kreatifitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain perhatian di harapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil, hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh mereka. Demikian pula halnya dengan pembangunan di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, nampaknya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama pembangunan sarana-sarana umum seperti jalan, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sebagainya.

Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur yaitu sarana ibadah dalam hal ini adalah pembangunan masjid. Dalam pembangunan tersebut masyarakat terlibat aktif mulai dari proses perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan pembangunan, bahkan dana yang di gunakan pada pembangunan masjid tersebut merupakan swadaya masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul skripsi “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqhi Siyasa (Studi Kasus Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur?
3. Bagaimana tinjauan *fiqhi siyasah* tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.
2. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqhi siyasah* tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

D. Manfaat penelitian

Adapun hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan study bagi mahasiswa hukum yang akan melakukan penelitian sejenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
- b. menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah perencanaan pembangunan

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Desa Bantilang dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.
- c. Sebagai reverensi bagi pemecahan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Definisi operasional dan penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman agar lebih mempermudah pelaksanaan program pembangunan fisik, maka perlu adanya batasan penelitian yang dioperasionalkan melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok dalam hal pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat di operasionalkan melalui indikator sebagai berikut :

- a. Pemikiran atau Ide-ide berupa masukan
- b. Uang atau Dana
- c. Materi atau Barang
- d. Tenaga (Fisik)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dapat dioperasionalkan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung yang dimaksud adalah segala sesuatu yang sifatnya membantu atau mendukung peran serta masyarakat dalam pembangunan yang ada di wilayah Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.
- b. Faktor penghambat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi pengganjal atau yang menghalangi keikutsertaan masyarakat di dalam pembangunan yang ada di wilayah Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan terkini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan Wahyuddin dengan judul “*Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*”. Dalam penelitian Wahyuddin membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng adalah faktor interen yang meliputi (kesadaran/ kemauan, pendidikan, pendapatan/penghasilan). Faktor eksternal yang meliputi (pemerintah desa dan fasilitas yang tersedia).¹ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam Pembangunan desa di desa Bantilang, kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur, perbedaan dari penelitian ini bahwa dalam penelitian Wahyudin lebih spesifik untuk menganalisa tentang faktor yang menjadi penghambat masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yudhiansyah Eka Saputra dengan judul “*Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Kasus: Dana Desa di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau)*”, penelitian Yudhiansyah Eka Saputra membahas tentang hubungan antara faktor

¹ Wahyuddin, *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).

Internal (umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan penelitian Yudiansyah ini mengangkat kasus tentang dana desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa studi kasus dana desa,² jadi peningkatan partisipasi masyarakat melalui dana desa. Sedangkan dalam penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dimana letak perbedaannya yaitu penelitian ini lebih spesifik terhadap partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat dalam berpartisipasi, begitupun dengan judul dan letak lokasi penelitian ini yang berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhito yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Candi Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*”, penelitian yang dilakukan oleh Ardhito ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi pembangunan fisik desa adalah tingkat pendidikan kepala keluarga adalah tidak terbukti, karena hasil toleransi yang mempunyai nilai paling tinggi adalah tingkat pendapatan, jadi penelitian ini memberikan penjelasan bahwa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat ialah faktor pendidikan, faktor ekonomi, dll.³ Jadi fisik masyarakat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi, sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik terhadap partisipasi masyarakat, yang membahas secara umum.

² Yudiansyah Eka Saputra, *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Kasus : Dana Desa di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apik, Kabupaten Siak, Riau)*, Skripsi, (Bogor : INSTITUT PERTANIAN BOGOR, 2016).

³ Ardhito, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik desa*, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).

B. Kajian pustaka

1. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*participation*” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.⁴

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.⁵

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.⁶

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok,

⁴ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>, (diakses pada tanggal 07 September 2018).

⁵ Siti irene astuti D, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011) h. 31.

⁶ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan* (Rineka Cipta, 2009), h. 287.

melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.⁷

Sedangkan Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 pengertian, yaitu :

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- 5) Partisipasi adalah pementapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.⁸

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk

⁷ Wazir Ach Ws, *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat* (Sekretariat Bina Desa, 1999), h. 29.

⁸ Rizal Andreeyan, <https://eprints.uny.ac.id/7876/3/bab%20%20-%2008110244006.pdf>, (diakses pada tanggal 07 September 2018).

kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.⁹

2. *Partisipasi masyarakat*

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan.¹⁰

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi Rukminto Adi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹¹

Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

⁹ I Nyoman Sumaryad, *Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi Dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia* (Ghalia Indonesia, 2010), h. 46.

¹⁰ Bambang panudju, *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah* (1999), h. 71.

¹¹ Isbandi Rukminoto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas* (FISIP UI Press, 2007) ,h. 27.

a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.

b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.

c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.

d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang incidental.

e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).

f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus

ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.¹²

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan dapat diartikan pula sebagai aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek di masyarakat.¹³

Ada 3 alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting menurut Conyers yaitu: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*,

¹² Weni Rosdiana, <https://eprints.uny.ac.id/7876/3/bab%20%20-%2008110244006.pdf>, (diakses pada tanggal 28 September 2018).

¹³ Rahardjo Adisasmata, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan* (Graha Ilmu, 2006), h.34.

bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.¹⁴

Menurut Oos. M. Anwas salah satu indikator dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat.¹⁵ Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja dan bukan juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna keterlibatan untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian konsepsi partisipasi dalam pembangunan memiliki perspektif yang sangat luas. Seorang dikatakan telah berpartisipasi apabila ia telah terlibat secara utuh dalam proses pelaksanaan pembangunan baik secara fisik maupun mental. Keterlibatan individu dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kontribusi.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian

¹⁴ Weni Rosdiana, <https://eprints.uny.ac.id/7876/3/bab%202%20-%2008110244006.pdf>, (diakses pada tanggal 28 September 2018).

¹⁵ Oos M Anwas, *Pemberdayaan masyarakat Di Era Global* (Alfabeta Bandung, 2013), h. 92.

musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran.¹⁶ Sebagai masukan, partisipasi masyarakat berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Disini, partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya.

3. Prinsip-prinsip partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw) adalah:

- a) Cakupan.

¹⁶Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* (Rineka cipta, 1990), h.109.

Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

b) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*).

Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

c) Transparansi.

Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

d) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*).

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

e) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*).

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

f) Pemberdayaan (*Empowerment*).

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

g) Kerjasama.

Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

4. *Bentuk dan tipe partisipasi*

Dari segi bentuk, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu : bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan bentuk partisipasi yang di berikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak).

1. Bentuk partisipasi dalam bentuk nyata

- Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan;
- Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas;
- Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program;
- Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

2. Bentuk partisipasi dalam bentuk tidak nyata

- Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk

mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya;

- Partisipasi sosial adalah bentuk partisipasi yang diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
- Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan adalah masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
- Partisipasi representatif adalah partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Menurut Effendi, partisipasi ada dua bentuk, yaitu : *pertama*, Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan. *Kedua*, Partisipasi horizontal adalah masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.¹⁷

¹⁷ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi> (diakses pada tanggal 02 Oktober 2018)

Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization. Seperti dijelaskan dibawah ini;

1) Partisipasi pasif/manipulatif

Yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

2) Partisipasi dengan cara memberikan informasi

Yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

3) Partisipasi melalui konsultasi

Yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak ada peluang bagi pembuat keputusan

bersama; profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

4) Partisipasi untuk insentif materiil

Yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatankegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.

5) Partisipasi fungsional

Yaitu masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.

6) Partisipasi interaktif

Yaitu masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; partisipasi ini cenderung melibatkan metode interdisiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.

7) Self mobilization

Yaitu masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

5. *Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi*

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell seperti dikutip oleh Saca Firmansyah menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan.

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan.

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan. Lamanya tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung

lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.¹⁸

Sedangkan menurut Holil seperti dikutip oleh Saca Firmansyah unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- 1) Kepercayaan diri masyarakat;
- 2) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
- 3) Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
- 4) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
- 5) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
- 6) Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
- 7) Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
- 8) Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- 9) Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.¹⁹

¹⁸ Saca Firmansyah, <https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>, (diakses pada tanggal 02 Oktober 2018).

¹⁹ Saca Firmansyah, <https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>,(diakses pada tanggal 06 Oktober 2018).

6. *Pembangunan*

Pada dasarnya, semua pembangunan antar daerah tidak bisa sama. Kesenjangan antara daerah tetap ada, misalnya kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan, kesenjangan antara wilayah di pulau sulawesi selatan dengan pulau di luar sulawesi selatan. Maka pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menghidupkan parlemen wilayah/desa yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, atau Negara yang satu dengan Negara yang lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.²⁰

Menurut S.P. Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).²¹

²⁰ Artikelsiana. <http://www.artikelsiana.com/2017/08/pengertian-pembangunan-tujuan-menurut-para-ahli-ciri-ciri.html> (diakses pada tanggal 06 Oktober 2018).

²¹ S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (PT Gunung Agung Jakarta, 1994), h. 13.

Menurut Kunarjo tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah.²²

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta menentukan masukan- masukan yang menyeluruh, berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.²³

Menurut Todaro bahwa pengertian pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar, sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yakni kecukupan yang memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta kebebasan dalam memilih. Selanjutnya pengertian pembangunan menurut Todaro bahwa sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.²⁴

Selanjutnya di jelaskan oleh Bintoro Tjokroamidjojo bahwa Pembangunan adalah suatu proses dinamis, kebijaksanaan harus memberi peluang kepada

²² Kunarjo, *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan* (Universitas Indonesia, Jakarta 2002), h.24.

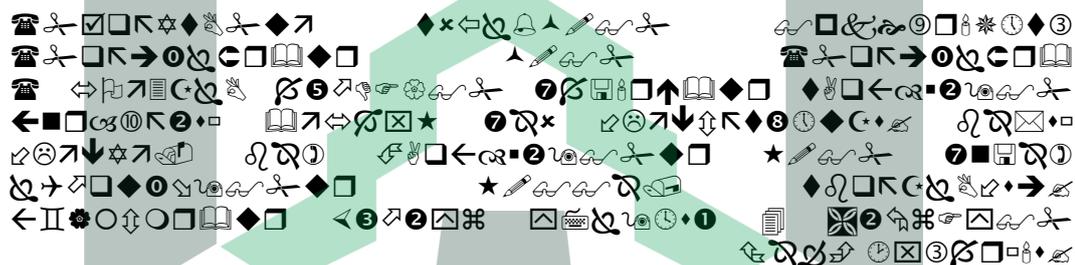
²³Haryono Sudriamunawar, *Kepemimpinan, Peran Serta Dan Produktivitas* (Mandar Maju Bandung, 2006), h. 17.

²⁴ Todara, M dan Smith, S, *Pembangunan Ekonomi* (Erlangga Jakarta, 2011), h. 19..

kenyataan tetapi harus mengandung kepastian dan kesinambungan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dengan keridhoan dari Tuhan Yang Maha Esa.²⁵

Pengertian pembangunan seperti yang telah di uraikan pada kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang di miliki. Semua itu di maksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi kesejahteraan Rohani maupun Jasmani

Allah SWT Berfirman, Q.S An-nisa'(4) ayat (59) :



Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁶

Penjelasan ayat di atas ialah bagaimana dalam suatu kelompok harus memiliki pemimpin dan kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya begitu pula kepada pemimpin yang sah yang menjadi tangan

²⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan* (Lembaga penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1974), h. 17.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV : Darus sunnah, 2015).

Tuhan dimuka bumi selama program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bertentangan dengan Al quran dan sunnah rasul. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masyarakat diwajibkan untuk selalu taat dan patuh terhadap pemimpin yang sah dan ditunjuk bersama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan desa di Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

7. Pembangunan dalam *fiqh siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁷

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat :

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris

²⁷ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.

3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.²⁸

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn' Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²⁹

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga Negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat

²⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), h. 45.

²⁹ Djazul, *Fiqh Siyasah*, h. 109

ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Secara garis besar maka objeknya menjadi, *pertama*, peraturan dan perundang-undangan, *kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan *ketiga*, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyasah*. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat".

Konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

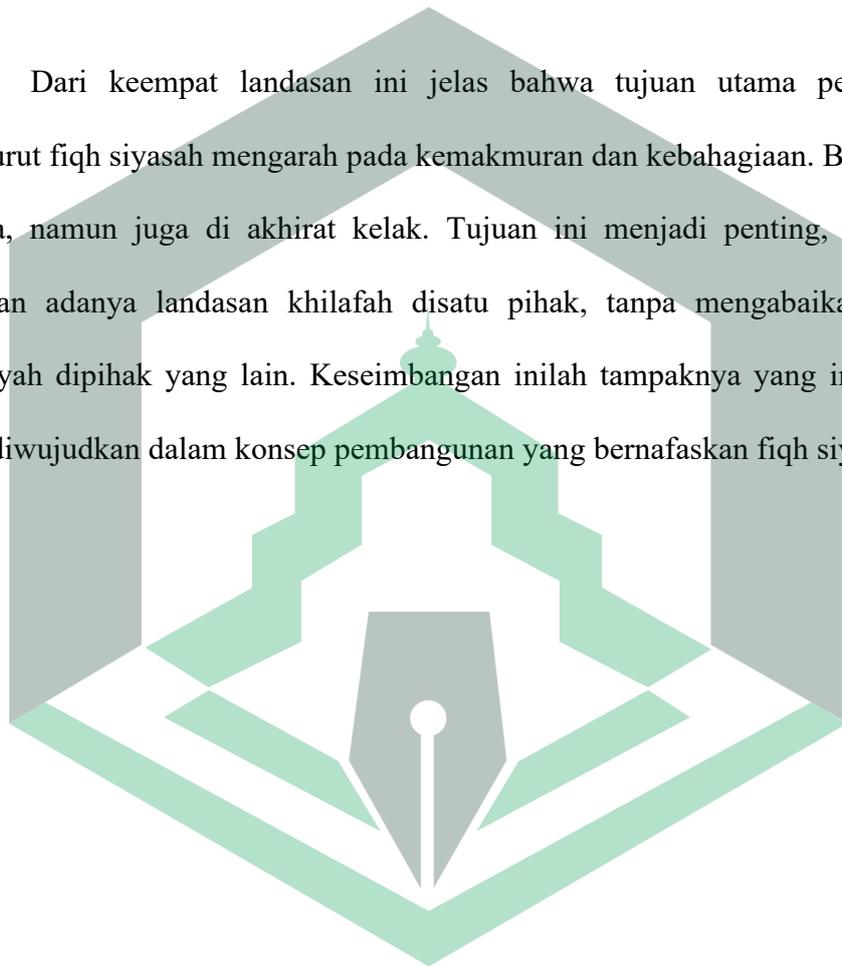
Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan *fiqh siyasah* terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu:

1. *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.³⁰
3. *Khilafah* (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.

³⁰ Heriyanti, Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan Fungsi Bappada dalam Perencanaan Pembangunan, Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, Lampung), h. 37

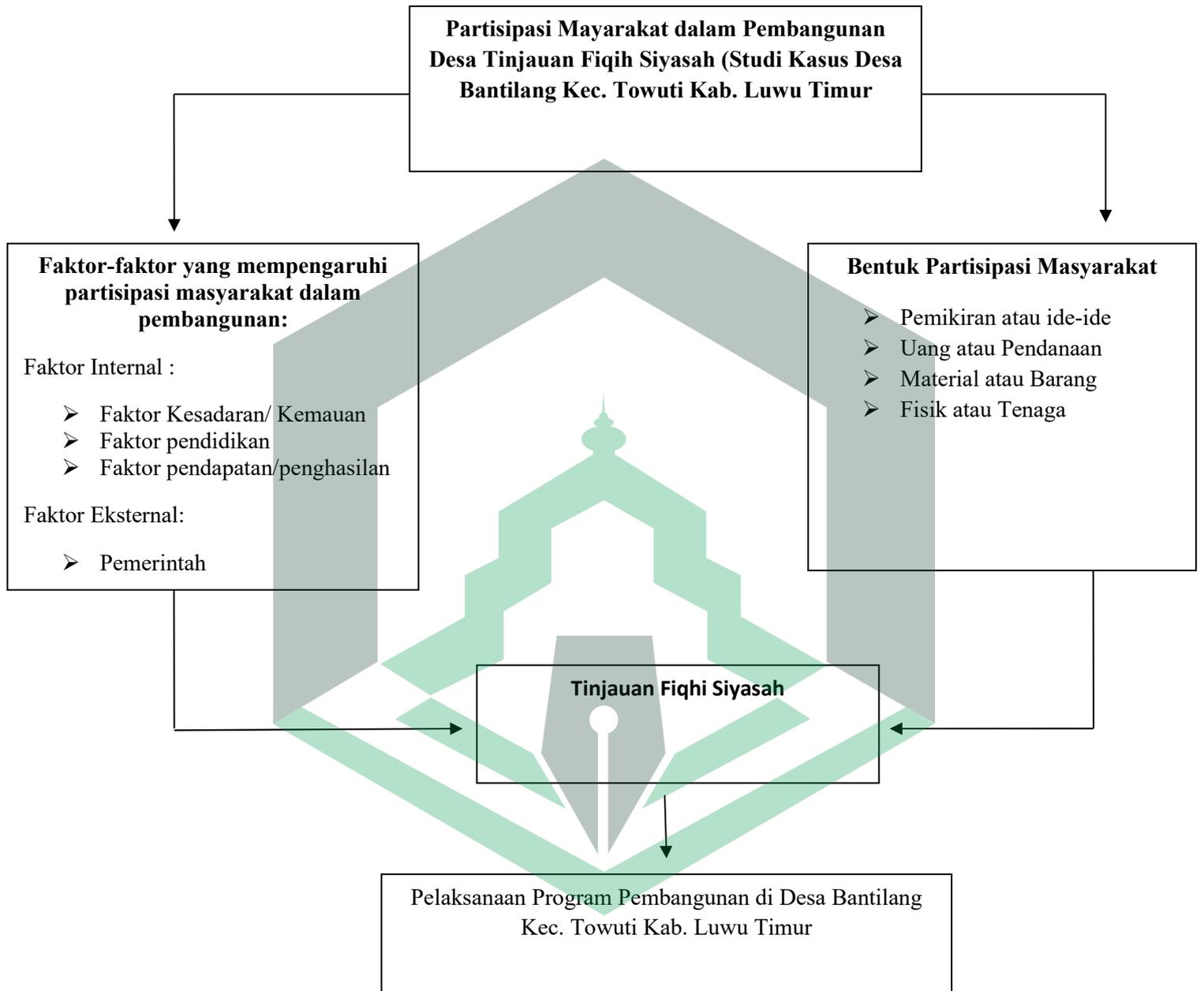
4. *Tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.³¹

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah.



³¹Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Implementasi Pada Periode dan Masa Kini, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 17

8. Kerangka fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh dan menggambarkan data mengenai "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqhi Siyash (Studi Kasus Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)*".

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan empiris yang mengarah kepada masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dalam tinjauan hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih yaitu Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama.¹ Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan secara terstruktur yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian penulis.

Data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan berwenang serta memiliki pengetahuan tentang penelitian ini.²

Agar data primer ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, maka diperlukan sumber data dari obyek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu; tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.³

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah camat, lurah, tokoh masyarakat, masyarakat dan informan lain yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang telah terolah dan tersedia di

¹Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, cet. IV, (Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2014), h. 216.

²Sugiyono, Metedo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 215.

³Sugiyono, Metedo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 215.

lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

D. Subyek Penelitian

Subyek adalah keseluruhan objek penelitian.⁴ Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefenisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan lain-lain.⁵Jadi subyek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai datayang diperlukan dalam penelitian.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah adalah Bapak Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, masyarakat dan informan lain yang dibutuhkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan literatur yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dapat berupa pendapat para ahli, batasan-batasan, pengertian serta hal-hal yang turut

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 167.

⁵Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 81.

mendukung dan melengkapi skripsi ini dalam menggunakan metode tersebut. Ada dua cara yang digunakan penulis dalam kepustakaan yaitu:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang berkaitan dengan pembahasan tanpa merubah redaksi beserta isi dan maknanya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang mempunyai kaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang bisa didapatkan dalam bentuk ikhtisar, ulasan atau uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya, namun tidak mengurangi dari makna dan tujuannya.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengamati langsung objek penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi yang dilaksanakan secara langsung, observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek di selidiki.⁶

⁶ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010),h. 96.

Adapun observasi yang digunakan ialah mengamati bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

b. Interview

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau questioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data dari subyek penelitian yaitu dari masyarakat yang ada di Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁷ Mengenai dokumentasi yang digunakan ialah dokumentasi mengenai data-data kegiatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dan lain-lainnya yang berhubungan dengan hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet 13; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Langkah yang pertama adalah reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.

2. Displan Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data teroganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

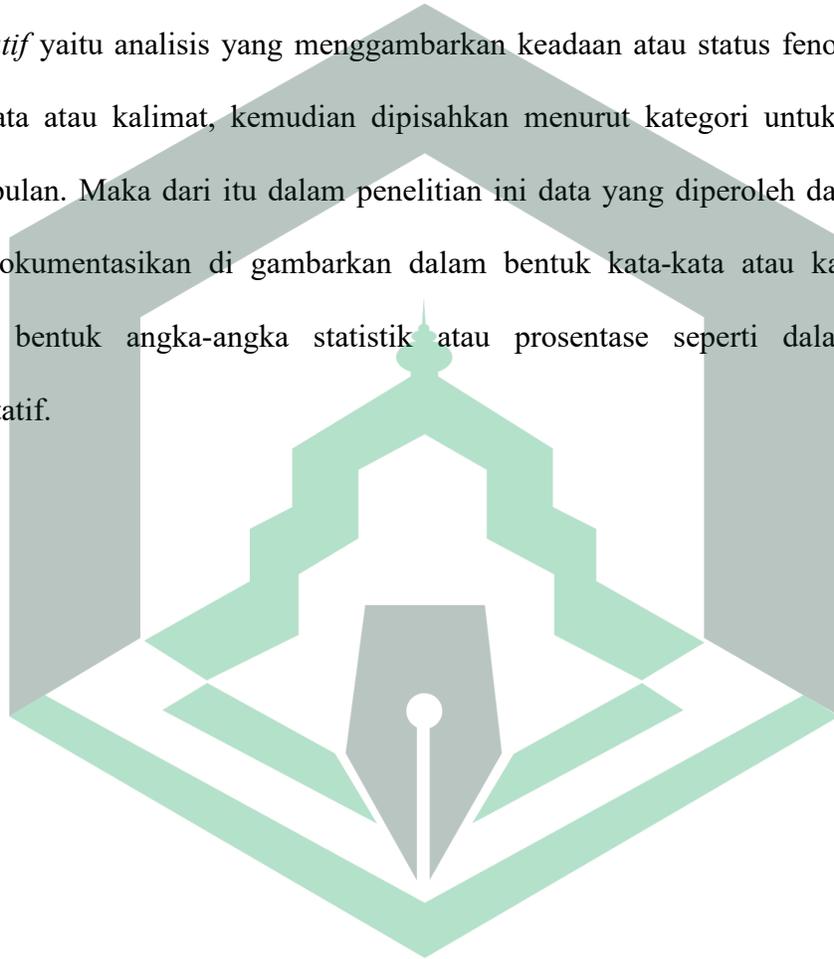
3. Conclusion Data

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau conclusion data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya.

Dalam menganalisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara atau dokumentasikan di gambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Desa Bantilang

Desa Bantilang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Bantilang itu sendiri berarti tempat penjemuran kayu ramuan rumah dan terdiri 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Setia, Dusun Bantilang dan Dusun Larona. Terdiri dari 11 (sebelas) RT. Berikut Gambaran tentang sejarah Perkembangan Desa Bantilang :

1919 – 1929: Pada masa itu cikal bakal Desa Bantilang masih dikuasai oleh suku To Laki dari Sulawesi Tenggara dan atas permintaan suku Padoe kepada Keadatuan Luwu untuk membantu mengusir Suku To Laki karena Bantilang masih Wilayah Kerjaan Keadatuan Luwu, maka Keadatuan Luwu mengutus Suku Rongkong untuk membantu suku Padoe mengusir Suku To Laki yang kebetulan pada saat itu suku Rongkong dipercaya oleh keadatuan Luwu sebagai pasukan Khusus, maka berdatanglah Ambe Mallangi bersama pasukannya dan terjadilah perang. Atas bantuan Suku Rongkong maka Suku To Laki berhasil di usir ke wilayah Sulawesi Tenggara (Rauta),

- 1930 – 1940: Pada masa itu bentuk Pemerintahan masih bersifat Kepala Kampung oleh Bapak Ambe Pangi dan alat transportasi Masyarakat masih berupa perahu dayung untuk menyebrangi Danau Towuti,
- 1941 – 1956: Pemerintah masih bersifat Kepala Kampung oleh Bapak Donde dan transportasi masyarakat berkembang menjadi perahu Layar pada masa ini sudah dikuasai oleh DI/TII,
- 1957 – 1963: Pemerintah sudah berubah menjadi Pemerintahan Desa dan Bantilang masih dibawah Desa Loeha Oleh Bapak Mardang sebagai Kepala Desa, Passaung sebagai Kepala Kampung Bantilang dan masih dikuasai oleh DI/TII,
- 1964 – 1965: Pemerintahan Desa dibawah pimpinan Bapak Abd. Hafid, dan Passaung sebagai Kepala Kampung Bantilang alat transportasi masyarakat masih perahu layar,
- 1982 – 1992: Pemerintahan dibawah Pimpinan Bapak B.Indar,
- 1993 – 2001: Bantilang dimekarkan menjadi satu Desa dan dipimpin oleh Bapak Biuddin,
- 2001 – 2008: Bantilang menjadi Desa Diferitif dan dilakukan pemilihan Kepala Desa Pertama sejak dimekarkan dari Desa Induk yaitu Desa Loeha, Terpilihlah Bapak Arifin Biuddin,S.Ag. pada masa jabatan 8 Tahun berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979,

2008 – 2014: Desa Bantilang kembali dipimpin Oleh Bapak Aripin Biuddin, S.Ag pada masa jabatan periode kedua atas hasil pemilihan bulan april 2008, berdasarkan UU 34 Tahun 2004,

2014 – 2015: Desa Bantilang di pimpin sementara Oleh Bapak Yusuf Timpa sebagai pejabat Kepala Desa Karena pada saat itu adalah masa Transisi pemerintahan Desa Bantilang,

2016 – 2021: Desa Bantilang Kembali dipimpin Oleh Bapak Aripin, S.Ag pada periode ke 3 tahun 2016 – 2021.¹

2. Kondisi Wilayah dan Penduduk

Desa Bantilang merupakan daerah yang sebagian wilayahnya daerah perbukitan dan sebagian daerah daratan rendah, dimana pada umumnya mata pencaharian masyarakat mayoritas sebagai petani merica, nelayan, petani padi, dll. Jumlah penduduk Desa Bantilang Kecamatan Towuti mencapai 2.028 jiwa yang terdiri dari 584 KK.

Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Towuti yang mempunyai jarak 27 Km dari ibu kota Kecamatan, 86 Km dari ibu kota Kabupaten, dan 675 Km dari ibu kota Provinsi. Secara geografis Desa Bantilang dengan Luas Wilayah 138,94 Km², yang berbatasan dengan :²

¹ Sumber data: Profil Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

² Sumber data: Buku Pedoman Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

| | | |
|-----------------|---|-----------------------------|
| Sebelah Utara | : | Desa Rante Angin |
| Sebelah Timur | : | Desa Masiku |
| Sebelah Selatan | : | Danau Towuti/Desa Tokalimbo |
| Sebelah Barat | : | Desa Tokalimbo |

Desa Bantilang terletak dipesisir Danau Towuti, Letak topografis tanahnya datar dan berbukit (bukit) dengan lahan datar sebagian besar di manfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan dan untuk perairan danau sebagian masyarakat memanfaatkan untuk bernelayan.

3. Keadaan Sosial

Letak geografis Desa Bantilang berada diposisi timur danau towuti dan barat daerah pegunungan, maka secara otomatis berpengaruh pada kondisi warga, masyarakat Desa Bantilang sebagian besar bermata pencarian petani dan sebagian nelayan. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Bantilang adalah sebagai berikut:³

- a) Keluarga sangat miskin : sebanyak 22 KK
- b) Keluarga sejahtera I / miskin (KS I) : sebanyak 62 KK
- c) Keluarga sejahtera II / hampir miskin (KS II) : 408 KK
- d) Keluarga sejahtera III / mampu (KS III) : 37 KK

³ Sumber data: Buku Pedoman Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Jumlah penduduk Desa Bantilang setiap tahun mengalami pertumbuhan. Hingga akhir tahun 2016, jumlah penduduk Desa Bantilang 2.028 jiwa yang terdiri dari :

- 1) Jumlah penduduk laki-laki : 1.016 jiwa
- 2) Jumlah penduduk perempuan : 1.012 jiwa
- 3) Jumlah KK : 584 KK

Jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan sebagai berikut:⁴

- 1) Tidak pernah sekolah : 3 jiwa
- 2) Belum sekolah : 162 jiwa
- 3) Tamat TK : 31 jiwa
- 4) Tamat SD : 588 jiwa
- 5) Tamat SLTP : 542 jiwa
- 6) Tamat SLTA : 434 jiwa
- 7) Tamat Diploma : 37 jiwa
- 8) Tamat S1 : 102 jiwa
- 9) Tamat S2 : 1 jiwa

Jumlah penduduk menurut jenis sumber penghasilan utama berdasarkan jumlah jiwa dirinci sebagai berikut:⁵

- 1) Petani dan Nelayan : 620 jiwa

⁴ Sumber data: Buku Pedoman Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

⁵ Sumber data: Buku Pedoman Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 2) Pensiunan PNS | : 2 jiwa |
| 3) Aparat Desa | : 12 jiwa |
| 4) Perawat | : 4 jiwa |
| 5) Honorer/Upah Jasa/Bidan Swasta | :36 jiwa |
| 6) PNS/TNI/POLRI | : 29 jiwa |
| 7) Wiraswasta | : 15 jiwa |
| 8) Pelajar | : 455 jiwa |
| 9) Pertukangan/Buruh Bangunan | : 2 jiwa |
| 10) IRT | : 470 jiwa |

4. Kelembagaan Pemerintah Desa

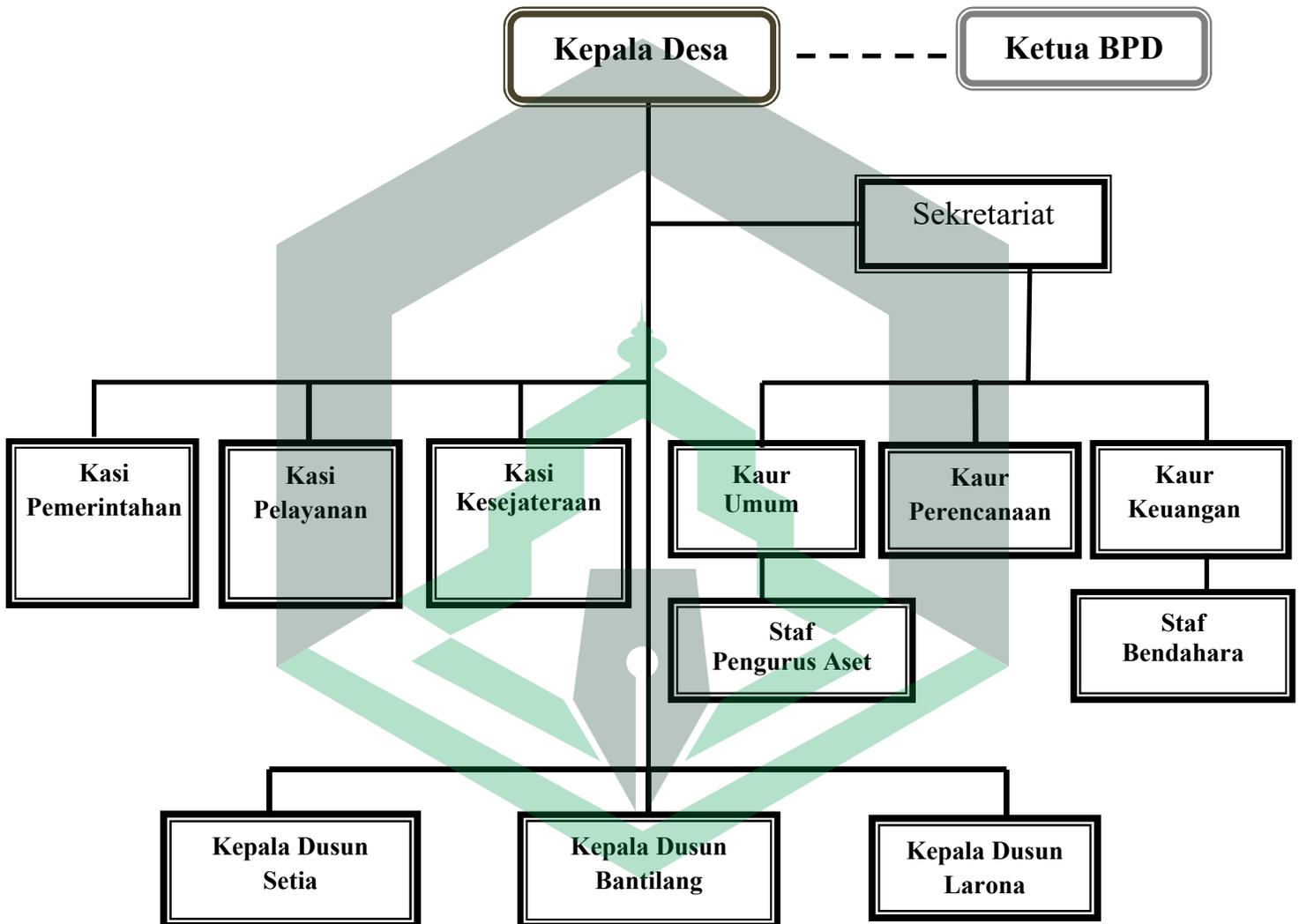
Wilayah desa bantilang terdiri dari tiga (3) dusun yaitu:⁶

- 1) Dusun Bantilang
- 2) Dusun Setia
- 3) Dusun Larona

⁶ Sumber data: Buku Pedoman Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

5. Struktur Organisasi pemerintahan Desa Bantilang

Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Bantilang yaitu sebagai berikut:⁷



⁷ Dokumentasi Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

6. Visi dan misi Desa Bantilang

Adapun visi dan misi Desa Bantilang, yakni:⁸

a. Visi

“Menjadikan Desa Bantilang Desa Yang Tentram Mandiri Dan Sejahtera”.

Visi ini mengandung makna tentang tekad warga masyarakat dan aparat Desa Bantilang menuju Desa yang mandiri, sehat dan terdepan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan norma yang dimiliki sehingga terwujud masyarakat Madani yang bermartabat.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sebuah institusi/desa sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Misi ini merupakan kerangka operasional dari visi, sehingga dapat dikatakan bahwa visi akan mudah dicapai jika misi mudah dipahami.

Misi adalah cara-cara yang dipilih dan disepakati bersama untuk mewujudkan visi pada satu waktu di masa depan, yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang.

Adapun misi Desa Bantilang dalam RPJMDes Tahun 2006-2021 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintah yang baik dan benar (baik menurut masyarakat benar menurut hukum) secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku,

⁸ Dokumentasi Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

2. Mewujudkan dan mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat .
 3. Meningkatkan pengembangan lembaga dan kegiatan Keagamaan.
 4. Meningkatkan Pembinaan Generasi Muda
 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, jalan Desa, jalan Lingkungan, jalan Produksi, jalan Tani, sarana Pertanian, sarana Pendidikan, sarana Kesehatan, sarana Air bersih serta Infrastruktur lainnya.
6. Peta Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur



B. Pembahasan

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur

Menurut Yusuf Timpa selaku pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dalam wawancaranya.

“...Partisipasi masyarakat desa bantilang dalam pembangunan dapat dikatakan berada pada tingkat sedang. Dari tahun 2016 mengalami peningkatan tiap tahunnya, hingga saat ini dapat di perkirakan 45% penduduk Desa Bantilang ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan Desa.”⁹

Ada banyak bentuk partisipasi seperti yg di jelaskan pada bab 2 (dua), Dalam penelitian ini penulis mengambil 4 (empat) bentuk partisipasi yaitu : partisipasi uang, partisipasi barang, partisipasi tenaga, dan partisipasi pemikiran.

Menurut Kaur Pembangunan Desa Bantilang di antara 4 bentuk partisipasi tersebut, kebanyakan masyarakat berpartisipasi dalam bentuk uang dan bentuk tenaga. Sedangkan yang paling minim adalah partisipasi dalam bentuk barang.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Efendi salah satu warga Desa Bantilang,

“...selama ini kami sebagai warga Desa bantilang hanya berpartisipasi dalam bentuk uang dan bentuk tenaga. Mata pencaharian Masyarakat Desa Bantilang mayoritas petani merica, Jika pembangunan di lakukan bertepatan dengan musim merica, maka sebagian besar berpartisipasi dalam bentuk uang. Sedangkan dalam bentuk barang sangat jarang, karena akses untuk mendapatkan barang-barang yang di perlukan dalam pembangunan harus melalui transportasi air atau katinting (kapal air).”¹⁰

⁹Yusuf Timpa, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Bantilang. Wawancara di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 14 Mei 2019.

¹⁰ Efendi, Masyarakat Desa Bantilang. Wawancara di Desa Bantilang Kec. Tuwuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 19 Mei 2019.

a. Partisipasi dalam bentuk uang

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam menyelenggarakan pembangunan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang dialami setiap daerah begitupun di Desa Bantilang.

Berbagai upaya telah di lakukan termasuk di dalamnya kemampuan pemerintah Desa Bantilang dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat Desa Bantilang dalam bentuk sumbangan uang adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pejabat sementara “Pjs” Kepala Desa Bantilang bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur menelan biaya yang cukup besar dan dana yang digunakan sebagian besar dari sumbangan masyarakat Desa Bantilang. Sesuai dengan penjelasan Pjs Kepala Desa Bantilang yakni :

“ Dalam hal pembangunan kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk pembangunan Desa, dapat membantu dalam bentuk uang dalam bentuk swadaya masyarakat. namun kami tidak memaksakan, hal ini karena kami tidak bisa mengharap sepenuhnya terhadap dana

Desa yang berasal dari APBN maupun ADD. Dan respon masyarakat yang kami liat cukup baik."¹¹

b. Partisipasi dalam bentuk tenaga

Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau tenaga.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya

Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu contoh pembangunan desa yaitu sarana ibadah(masjid). Sebagaimana wawancara kepada Cakra salah satu warga masyarakat Desa Bantilang,

*"..kalau partisipasi dalam bentuk tenaga seperti membersihkan saluran air, perbaikan jalan dan penimbunan jalan di tiap dusun, biasanya hanya di lakukan oleh orang-orang di daerah atau tiap dusun tersebut, tetapi jika pembangunan untuk kepentingan umum seperti jalan poros, jalan tani apalagi jika pembangunan di lakukan untuk kegiatan religious seperti pembangunan masjid maka masyarakat akan serentak ikut terlibat di dalamnya."*¹²

c. Partisipasi dalam bentuk pemikiran

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan. Partisipasi

¹¹Yusuf Timpa, Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Bantilang. Wawancara di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 13 Mei 2019.

¹² Cakra, Masyarakat Desa Bantilang. Wawancara di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 24 Mei 2019.

dapat di wujudkan pada berbagai macam kesempatan, seperti melalui pertemuan / rapat, melalui surat / saran dan tanggapan terhadap proses pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap-tahap tertentu keterlibatan masyarakat sangatlah di butuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Bantilang yakni mengemukakan bahwa :

*“pembangunan yang ada di Desa Bantilang sebagian besar adalah hasil dari usulan masyarakat. Secara tidak langsung ide dan gagasan pembangunan awalnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat Desa Bantilang. Ide-ide inilah yang kami saring lalu di pertimbangkan yang mana akan kita masukkan sebagai bentuk pembangunan.”*¹³

Berdasarkan wawancara terhadap Asri selaku sekretaris desa,

*“hanya sebahagian kecil masyarakat yang ikut atau datang dalam mengikuti rapat, salah satu alasannya adalah mereka tidak mempunyai kemampuan berbicara di depan umum, sebagian besar yang hadir hanyalah petua-petua atau petinggi di Desa Bantilang. Meskipun begitu, mereka punya masukan pemikiran yang bagus dan tetap melihat bagaimana pembangunan yang akan kita jalankan ke depan.”*¹⁴

d. Partisipasi dalam bentuk materi (barang)

Dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sumbangan

¹³ Yusuf Timpa, Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Bantilang. Wawancara di Di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 13 Mei 2019.

¹⁴ Asri, Sekretaris Desa Bantilang. Wawancara di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 26 Mei 2019.

masyarakat dalam bentuk materi (barang). Tidak semuanya masyarakat menyumbang dalam bentuk uang tetapi ada juga masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk materi (barang), bahkan ada masyarakat yang menyumbangkan kedua-duanya (uang atau materi). Hal ini didasari karena adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Sumbangan materi (barang) biasanya dilakukan secara langsung. Dimana sumbangan materi (barang) tersebut diperuntukkan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan mesjid, jembatan, perbaikan jalanan dan sarana-sarana umum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung ke pada masyarakat, bahwa di Desa Bantilang sangat jarang masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk materi (barang), mereka lebih memilih menyumbangkan uang dengan alasan bahwa untuk menyumbang dalam bentuk materi (barang) akan menyita waktu dan tenaga. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan Sulaiman selaku Kaur Pembangunan Desa Bantilang yang mengatakan bahwa :

“..jarang sekali masyarakat yang memberikan sumbangan dalam bentuk materi, mereka lebih memilih memberikan uang. Karena akses untuk mendapatkan materi (barang) yang dibutuhkan dalam pembangunan seperti batu, pasir, kayu papan, kayu balok, dan semen, harus melalui transportasi air terlebih dahulu.”¹⁵

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

¹⁵ Sulaiman, Kaur Pembangunan Desa Bantilang. Wawancara di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 27 Mei 2019.

Pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan di wilayah Desa maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat Desa lah yang menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan, menurut penulis faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa Bantilang adalah faktor internal yang meliputi kesadaran, pendidikan dan penghasilan / pendapatan. Sedangkan faktor eksternal meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan / fasilitas.

1. Faktor internal

- a) Factor kesadaran/kemauan

Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang merupakan lokasi penelitian ini.

Masyarakat Desa Bantilang berpartisipasi dalam pembangunan di segala bentuk (ide/fikiran, uang, materi/barang, dan tenaga) adalah merupakan bagian besar dari kesadaran yang dimiliki masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat telah mengetahui dengan jelas mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Alasan lain karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibrahim salah satu masyarakat Desa Bantilang, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“alasan kami ikut berpartisipasi karena kami masih punya rasa solidaritas yang tinggi sesama warga masyarakat untuk saling membantu. Kami juga memang terbiasa akan kerja gotong royong. Tapi terkadang terkendala karena kesibukan masing-masing.”¹⁶

b) Faktor pendidikan

Jika pendidikan dihubungkan dengan partisipasi dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan dan mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah,

¹⁶ Ibrahim, Masyarakat Desa Bantilang. Wawancara di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 15 Juni 2019.

maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan dalam bentuk ide dan pikiran biasanya dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan juga banyak di antara yang hadir dalam rapat-rapat pembahasan pembangunan yakni orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi sesuai dengan ungkapan Kaur Pembangunan Desa Bantilang.

“...Orang-orang yang datang saat pembahasan pembangunan yang terkadang lebih banyak yakni orang-orang yang mengerti. Dan juga orang-orang yang mampu bicara. Dan dari data yang kami peroleh memang mereka termasuk kategori orang yang berpendidikan, yaitu Tamat Diploma 3, Tamat S1 dan juga para petua Desa Bantilang.”¹⁷

Untuk mengetahui Jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat data berikut :

- 1) Tidak pernah sekolah : 3 jiwa
- 2) Belum sekolah : 162 jiwa
- 3) Tamat TK : 31 jiwa
- 4) Tamat SD : 588 jiwa

¹⁷ Sulaiman, Kaur Pembangunan Desa Bantilang. Wawancara di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 27 Mei 2019.

- 5) Tamat SLTP : 542 jiwa
- 6) Tamat SLTA : 434 jiwa
- 7) Tamat Diploma : 37 jiwa
- 8) Tamat S1 : 102 jiwa
- 9) Tamat S2 : 1 jiwa

Dari data ini dapat di lihat bahwa masyarakat pendidikan tinggi tergolong banyak, walaupun sebagian kerja di luar daerah. Sedangkan partisipasi dalam bentuk tenaga rata-rata yang hadir adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sebagaimana yang di sampaikan bapak Ludding (pendidikan tamat SLTP).

“..untuk sumbangan bentuk fikiran atau menghadiri rapat, kami kurang aktif karena alasan kami tidak mampu berbicara di depan umum, akan tetapi jika turun ke lapangan (partisipasi tenaga) kami memiliki antusias dan rasa kebersamaan yang tinggi.”¹⁸

Melihat kenyataan ini maka jelas bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam pembangunan, khususnya partisipasi dalam bentuk ide (fikiran).

c) Faktor pendapatan/penghasilan

Berdasarkan penghasilan masyarakat di Desa Bantilang yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Di samping penghasilan / pendapatannya yang tidak sama juga tingkat kesibukannya (waktu / kerja) berbeda-beda pula. Semua itu dapat mengurangi partisipasinya dalam

¹⁸ Ludding, Masyarakat Desa Bantilang. Wawancara di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 15 Juni 2019.

pembangunan. Hal tersebut adalah merupakan pantauan penulis selama melakukan penelitian yang ditegaskan oleh beberapa masyarakat yang diinterview secara langsung.

Menurut keterangan dari beberapa masyarakat serta pantauan langsung dari peneliti, maka diketahui bahwa penyebab perbedaan tingkat partisipasi adalah perbedaan jumlah penghasilan dan kestabilan dari pada masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi penghasilan seseorang maka memungkinkan untuk partisipasi dalam pembangunan semakin tinggi pula, akan tetapi jika penghasilan / pendapatan tidak stabil atau tidak rutin maka jelas akan menghambat orang untuk partisipasi, alasan yang lain diperoleh penulis sehingga ada masyarakat yang jarang atau tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk uang (dana) karena biasanya perhitungan hidupnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan. Hal serupa juga di katakan oleh Sekretaris Desa Bantilang, yaitu :

“...jika di tinjau dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang, kebanyakan dari masyarakat yang berpenghasilan lebih, atau dikatakan orang berada. Jika orang-orang yang berpenghasilan renda terkadang lebih memilih menyumbangkan tenaga mereka guna pembangunan”¹⁹

2. Faktor eksternal

a) Kepemimpinan Pemerintah

Penulis telah mengemukakan pada bagian terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan di Desa Bantilang pada khususnya tidak timbul begitu

¹⁹ Asri, Sekretaris Desa Bantilang. Wawancara di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 26 Mei 2019.

saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat.

Masyarakat adalah paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat / karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi akan terjadi sebaliknya jika kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah bertentangan dengan sifat dan karakter dari masyarakat yang dipimpinnya.

Dengan kepemimpinan yang baik dan terarah oleh pemerintah maka jelas akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan akan dilaksanakan dengan baik tanpa merasa unsur paksaan atau keterpaksaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti ungkapan Bapak Yusuf Timpa selaku Pejabat Sementara (Pjs) Desa Bantilang Dalam wawancaranya :

“...untuk mengajak masyarakat Desa Bantilang ikut aktif (berpartisipasi) dalam pembangunan, dengan menggunakan strategi yaitu membangun komitmen bersama dengan masyarakat, cara penerapannya yaitu dengan mengundang (melibatkan) seluruh masyarakat dalam musyawarah desa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pokok-pokok pikiran atau ide terkait dengan pembangunan.”²⁰

²⁰ Yusuf Timpa, Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Bantilang. Wawancara di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, Tanggal 13 Mei 2019.

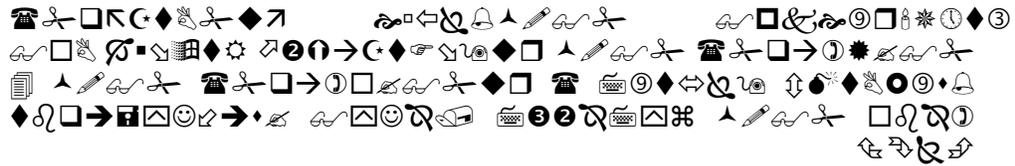
3. Tinjauan fiqhi siyasah tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan.

Salah satu indikator dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja dan bukan juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna keterlibatan untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Terkait dengan arti partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam kajian fiqhi siyasah, sebelum melakukan sebuah pembangunan pemerintah dan masyarakat harus mempunyai sebuah perencanaan terlebih dahulu. Begitupun setiap individu harus mempunyai perencanaan dalam kehidupan sehari-hari, harus memperhatikan setiap apa yang dikerjakan, serta harus mempersiapkan diri untuk selalu berbuat baik untuk hari esok.

Allah SWT berfirman :



Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-hasyr :18).²¹

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu :

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV : Darus sunnah, 2015).

Pertama, Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Disini konsep tauhid dalam perencanaan pembangunan di Desa Bantilang sudah sesuai dengan ajaran fiqh siyasah, yaitu Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi.

Kedua, Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama. Dalam fiqh siyasah pelaksanaan pembangunan di Desa Bantilang sudah sesuai dengan ketentuan rububiyah, dimana pemerintah dan masyarakat menyempurnakan segala petunjukNya dan pemberian-Nya dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah.

Ketiga, khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep

pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Di sini pemerintah Desa Bantilang dalam melaksanakan pembangunan sudah sesuai dengan fiqh siyasah, karena dengan pembangunan yang tidak lain bertujuan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga telah menunjukkan bahwa manusia adalah mahluk Allah SWT.

Keempat, Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan ke pundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang sudah sesuai dengan konsep takziyah Karena pemerintah dan masyarakat sudah menangani berbagai isu-isu yang ada keterkaitan dengan urusan kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam upaya kesejahteraan didunia sekaligus menggapai kebahagiaan di akhirat kelak.

BAB V

PENUTUP

Pada bab terdahulu telah diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, serta tinjauan fiqhi siyasah dalam pembangunan di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu timur. Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. Adapun kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil deskriptif kualitatif lapangan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dari tahun 2016 setiap Tahun mengalami peningkatan, hingga saat ini diperkirakan mencapai 45% yang berarti masuk dalam kategori sedang. Ada 4 bentuk partisipasi yang ideal dalam pembangunan Desa Bantilang, Yaitu : partisipasi dalam bentuk pemikiran (ide-ide), partisipasi dalam bentuk uang (pendanaan), partisipasi dalam bentuk material (barang), dan partisipasi dalam bentuk fisik (tenaga). Dari ke empat bentuk partisipasi ini yang paling dominan adalah partisipasi dalam bentuk uang dan tenaga, dan yang paling minim adalah partisipasi dalam bentuk barang, sedangkan partisipasi dalam bentuk pemikiran hanya masyarakat yang berpendidikan tinggi dan para petua dalam desa.

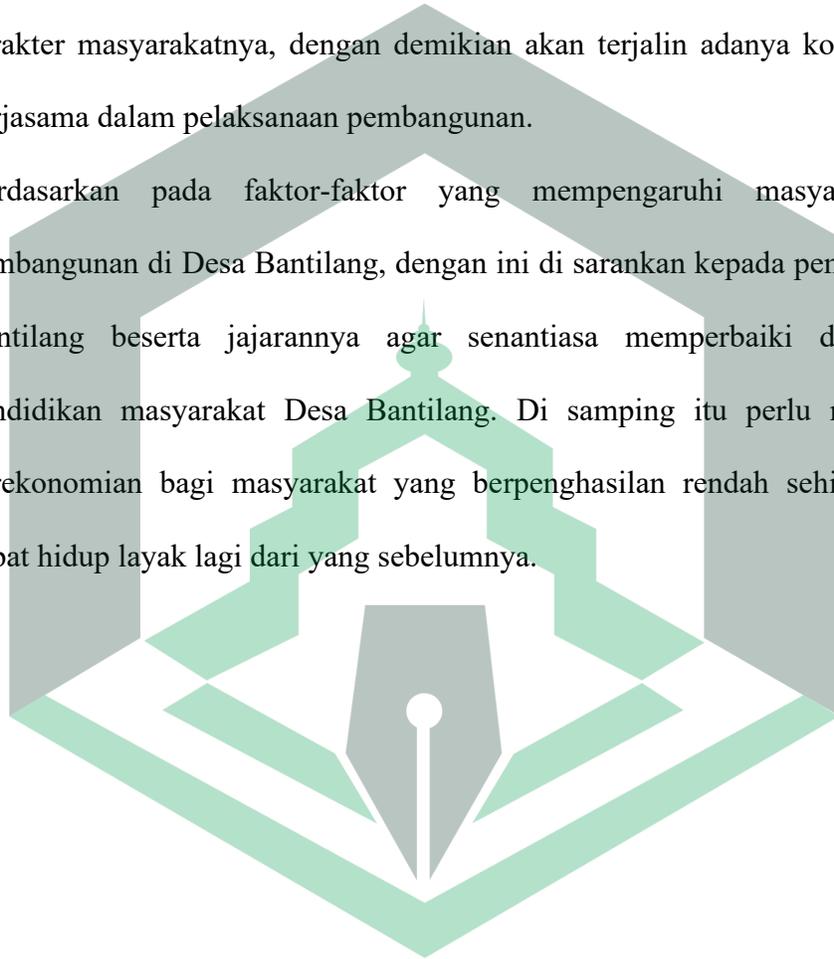
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur yaitu :
 - 1) Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, seperti penghasilan /pendapatan, tingkat pendidikan dan yang paling penting adalah adanya kesadaran diri masyarakat secara pribadi yang dilandaskan pada agama (Islam).
 - 2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan disekitar atau dari luar diri masyarakat yang meliputi kepemimpinan pemerintah (Kepala Desa Bantilang beserta aparatnya).
3. Tinjauan fiqhi siyasah dalam pembangunan di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur sudah sesuai dengan fiqhi siyasah, kerana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah dan Masyarakat melakukan pembangunan dengan tujuan kesejahteraan ummah. Hal ini dapat di lihat berdasarkan konsep pembangunan fiqhi siyasah yaitu : Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT), Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu), Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), dan Tazkiyah (penyucian dan pengembangan).

B. Saran

1. Dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur yang masih dalam kategori sedang, maka perlu adanya upaya-upaya oleh pemerintah untuk merangsang masyarakat

untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai salah satu contoh yang perlu ditempuh adalah memberikan kebebasan (kesempatan) kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan. Disamping itu pemerintah desa harus mampu menjalankan kepemimpinan sesuai karakter masyarakatnya, dengan demikian akan terjalin adanya komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bantilang, dengan ini di sarankan kepada pemerintah Desa Bantilang beserta jajarannya agar senantiasa memperbaiki dan mengejar pendidikan masyarakat Desa Bantilang. Di samping itu perlu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat hidup layak lagi dari yang sebelumnya.



Daftar Pustaka

Al-Quran Al-Qarim

Adi, I. R. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas*. FISIP UI Press, 2007.

Anwas, O. M. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bahasa, T. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Bintarto. *Pengantar Geografi Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Kedaulatan Rakyat, 1975.

I Nyoman Sumaryad. *Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi Dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2010.

D, S. I. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2001.

Nawawi, H. *Penelitian Terapan, cet IV*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2014.

Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu, 2006.

Panudju, B. *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Yayasan Adikarya Ikapi, 1999.

Riyanto, Y. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2010.

Taliziduhu Ndraha. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka cipta, 1990.

S, T. M. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Haryono Sudriamunawar. *Kepemimpinan, Peran Serta Dan Produktivitas*. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Siagian, S. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994.

Kunarjo. *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.

Sudjana, N. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Tilaar, H. *Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Tjokroamidjojo, B. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1974.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV : Darus sunnah, 2015).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Ws, W. A. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1999.

Sumber data: Profil Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Sumber data: Buku Pedoman Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Dokumentasi Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

<http://www.artikelsiana.com/2017/08/pengertian-pembangunan-tujuan-menurut-para-ahli-ciri-ciri.html> . Diakses pada tanggal 06 Oktober 2018.

<https://eprints.uny.ac.id/7876/3/bab%20%20-%2008110244006.pdf>.
Diakses pada tanggal 07 September 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/.partisipasi>.

<https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 02 oktober 2018.

